

Visi: "Indonesia yang bebas korupsi, demokratis, dan berkeadilan sosial"

Misi: "Mendorong dan memperkuat gerakan sosial melawan korupsi"

Core Values: didukung nilai-nilai Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Kesetaraan, dan Kepedulian dalam berbagai proses, sektor, dan level kehidupan masyarakat

**Organized
Citizen**

**Empowered
Participatory
Governance**

**Corporate
Active
Citizenship**

**Laws and
Justice**

Lampiran:

Program dan Indikator Strategic Priorities 2012-2017

Dimensi	Tantangan	Isu Strategis	Pendekatan	Programatik	Indikator
Organized Citizen: Penguatan Rakyat dan Jaringan untuk Melakukan Transformasi Struktural Melawan Korupsi	Lemahnya kapasitas dan infrastruktur jaringan dalam mengembangkan dan memanfaatkan political space	Membangun organized citizen yang kuat untuk terlibat dalam arena-arena publik	Mendorong dan meningkatkan kualitas local political space untuk deliberasi	1) Mengintensifkan lobby dan kampanye 2) Memperkuat keterlibatan dalam forum-forum warga.	Pemanfaatan public space untuk deliberasi
			Memperkuat infrastruktur pendukung gerakan	1) Penguatan pengetahuan dan expertise isu-isu sektoral. 2) Menciptakan voluntary system untuk pengkaderan aktivis 3) Membangun model pendanaan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya riset-based advocacy • Adanya resource center untuk diseminasi hasil-hasil riset, kasus, best-practices • Suplay aktivis antikorupsi • Basis pendanaan tersedia: endowment fund. crowd fund dll
			Memproduksi dan menyebarluaskan pedagogi kritis untuk penyadaran gerakan	1) Penciptaan simbol-simbol perlawanan baru, 2) Menggunakan cyber, sosial media dan medium kampanye kreatif baru gerakan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya instrumen pedagogi kritis • Produk kampanye dan edukasi melalui medium baru: audio visual, cyber-media sosial,
	Keterputusan kerja gerakan dgn political action	Menjembatani gerakan dengan politik melalui keterlibatan ke dalam forum-forum warga dan pengambilan kebijakan publik.	Menggalang pengorganisasian masyarakat.	1) Kampanye dan edukasi melawan korupsi. 2) Mobilisasi warga untuk terlibat dan mempertajam deliberasi dalam pengambilan kebijakan publik. 3) Penggalangan warga sebagai tax payer dalam memonitor public services	<ul style="list-style-type: none"> • Warga aktif mempertajam diskursus anti korupsi & keadilan sosial. • Kegiatan penyadaran yang massif • Database individu dan adanya kelompok-kelompok basis • Keterlibatan warga dalam forum pengambilan kebijakan

	Fragmentasi gerakan dalam berbagai isu, kepentingan dan identitas sektoral	Alignment isu anti korupsi dan gerakan demokrasi	Membangun collective identity dan collective action.	1) Menjalin komunikasi dan konsolidasi gerakan, 2) Eksperimentasi dalam common program/advokasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya collective identity • Terumuskannya common program
		Mainstreaming isu antikorupsi dalam advokasi lintas sektoral	Adopsi isu antikorupsi dalam advokasi sektoral	Menjadikan korupsi sebagai bagian dari penjelasan persoalan-persoalan sosial	Korupsi dijadikan bagian alat analisis
Empowered Participatory Governance: Pembentukan Institution and Political System untuk Inklusi Warga ke dalam Pengambilan Kebijakan Publik	Menguatnya predatory state dan rezim hybrid	Mendorong transformasi kekuasaan menjadi empowered participatory governance	Mempengaruhi kekuasaan untuk melakukan inklusi politik terhadap masyarakat sipil	1) Meneruskan dialog dan konsultasi dengan kementerian dan lembaga. 2) Mengoptimalkan kredibilitas gerakan untuk mendorong keterbukaan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah/penguasa mengadopsi deliberasi dalam pengambilan kebijakan publik • Program AC yg syarat keterbukaan partisipasi di pemerintahan
			Membangun relasi politik untuk menjalankan agenda-agenda publik	1) Mendorong partai-partai dan pemimpin politik yang pro-rakyat/demokrasi 2) Intensifikasi kampanye, lobi dan advokasi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya KELOMPOK oposisi yang menjadi mitra deliberasi masyarakat sipil • Agenda masyarakat sipil masuk dalam regulasi
	Kegagalan Good Governance dalam mengaddress problem politik dalam pengambilan kebijakan publik dan korupsi	Mengefektifkan Mekanisme Deliberasi untuk partisipasi warga yang substantif	Memperkuat pengaruh agenda gerakan sosial dalam forum-forum deliberatif.	1) Mendesak pembentukan forum deliberasi di sektor strategis. 2) Menjadikan hasil forum deliberasi mengikat secara politik.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya forum-forum deliberative sektor strategis • Berjalannya mekanisme perencanaan partisipatif yang menghasilkan kesepakatan yang mengikat secara politik
			Warga aktif melakukan audit sosial untuk mengontrol pelaksanaan keputusan-keputusan publik	1) Memastikan berfungsinya lembaga pelaksana deliberasi 2) Mendorong tumbuhnya kelompok pemantau independent	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya lembaga pelaksana deliberasi yang fungsional • Kempok pemantau dari warga

	Masih terbatasnya inisiatif antikorupsi di pemerintahan	Sektor-sektor Strategis pemerintah semakin terbuka dan akuntable	Memperkuat program antikorupsi yang ada dengan deliberasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Visioning koalisi strategis masyarakat sipil dengan pemerintah. 2) Mendorong leading institutions mengadopsi deliberasi sebagai instrument antikorupsi. 3) Kerjasama strategis untuk mendorong kebijakan dan program antikorupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program antikorupsi dijalankan • bekerjanya koalisi seperti AC Forum, EITI, OGP dll.)
Corporate Active Citizenship: Bisnis dan Sektor Keuangan yang Memiliki Kepedulian terhadap Keadilan Sosial dan Antikorupsi	Bisnis sebagai pemasok (<i>supply side</i>) korupsi	Mengurangi ruang-ruang persekongkolan korup dalam bisnis dan memperbaiki iklim berusaha	Mendorong Corporate Active Citizenship	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menerapkan prinsip-prinsip bisnis tanpa suap 2) Menerapkan tool antikorupsi untuk dunia bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Diterapkannya prinsip corporate good governance • Instrumentasi pakta integritas, complaint handling dan whistle blowing system.
			Menyuburkan kepemimpinan berbasis nilai-nilai integritas dan bisnis yang sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adopsi integritas dan visi bisnis yang sehat dalam kultur perusahaan dan kepemimpinan 2) Intensifikasi lobby dan kampanye kepada pengusaha-pengusaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Etika bisnis yang berintegritas • Pemimpin dan kultur perusahaan yang berintegritas • Inisiatif bisnis tanpa suap
Laws and justice: Pembentukan kebijakan dan rule of law yang berpihak pada public interest	Regulasi yang mendukung langgengnya kekuatan oligarki ekonomi dan politik	Mendorong reformasi kebijakan untuk melawan kekuatan oligarki ekonomi dan politik	Mendorong kebijakan antikorupsi yang inline dengan UNCAC	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memantau implementasi UNCAC secara independen. 2) Membuat analisis regulasi maupun implementasi sektoralnya 	<ul style="list-style-type: none"> • UNCAC independent review CSO • Gap analisis strategi antikorupsi dalam regulasi maupun implementasi sektoral dan daerah
			Terlibat aktif dalam mempengaruhi proses pembuatan legislasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan advokasi regulasi antikorupsi. 2) Aktif menyiapkan materi policy alternative. 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi antikorupsi masuk prolegnas • Draft policy alternatif

	Komunitas bisnis meng-capture kekuasaan demi melanggengkan bisnis dan kroninya	Memotong mata-rantai oligarkhi politik bisnis	Mendorong transparansi pendanaan partai politik dan pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendorong efektivitas regulasi dan tools pelaporan pendanaan partai. 2) Studi dan eksposur hubungan bisnis strategis dengan pendanaan partai 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan laporan dana politik parpol • Riset dan publikasi tentang politiko bisnis
			Memperkuat deliberasi dan instrument antikorupsi di sektor-sektor strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendorong akses informasi publik. 2) Mengintensifkan public monitoring 3) Dibangunnya sistem peringatan antikorupsi internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok pemantau independen • Complaint handling system. • whistleblowing system
	Upaya politikus membonzai wewenang KPK	Membangun dukungan publik (masyarakat sipil dan media) dalam mempertahankan eksistensi KPK	Kampanye dan advokasi publik yang kuat terhadap keberadaan KPK	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kampanye dan public engagement untuk menunjukkan dukungan terhadap KPK. 2) Mengadokasikan perbaikan regulasi untuk menjaga eksistensi Komisi Antikorupsi. 3) Mendorong KPK untuk aktif menangani kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya sejumlah collective action untuk menunjukkan dukungan terhadap KPK • Peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan dan vonis hukum yang dijatuhkan • Peningkatan pelaku korupsi yang dijerat hukum dan pengembalian kerugian/asset negara